

IDENTIFIKASI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN SANITARY LANDFILL DI DESA TUNGKAL SELATAN KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN

Syabahul Rizki Khairani^{1(a)}, Rahmadani Yusran^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}devikaputri2000@gmail.com, ^{b)}yusranrdy@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

09-02-2023

Diterbitkan Online:

31-03-2023

Kata Kunci:

Implementasi, Pemerintah Desa, Sanitary Landfill

Keywords:

Implementation, Village Government, Sanitary Landfill

Corresponding Author:

yusranrdy@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sanitary Landfill di Desa Tungkal Selatan Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman. Penelitian ini memakai pendekatan semi kualitatif. Pendekatan purposive sampling digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi informan penelitian. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi serta dokumentasi. Untuk teknik analisis data menggunakan reduksi data dan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi yaitu: (1) Sumber daya manusia yang mendukung untuk pengelolaan sanitary landfill. Untuk Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup pada anggota kebersihan memiliki 87 anggota kebersihan yang terdiri dari supir, stokarnya dan ditambah dengan 46 orang anggota lainnya. (2) Kedua, Komitmen yang mendukung untuk pengelolaan *Sanitary Landfill*. Bentuk komitmen yang dilakukan memberikan anggaran dan sumber daya manusia untuk melaksanakan pengelolaan *Sanitary Landfill* ini. (3) Ketiga, dukungan dan partisipasi masyarakat untuk pengelolaan sanitary landfill. Masyarakat tidak mau membebaskan lahan sebab lahan yang berstatus tanah ulayat atau tanah adat. (4) Keempat, anggaran dan alat terbatas untuk pengelolaan *Sanitary Landfill*. Dalam *Sanitary Landfill* Dinas Lingkungan Hidup membutuhkan anggaran sarana prasarananya dan anggaran sumber daya manusia.

ABSTRACT

This study intends to identify influencing factors in the Implementation of Village Government in Sanitary Landfill Management in South Tungkal Village, North Pariaman District, Pariaman City. This research uses a semi-qualitative approach. A purposive sampling approach was used in this study to identify research informants. For data collection techniques, it is carried out with interviews and observations and documentation. For data analysis techniques using data reduction and data presentation and drawing conclusions. The results showed that there are influencing factors, namely: (1) Human resources that support the management of sanitary landfills. For human resources, the Environment Agency has 87 cleaning members consisting of drivers, stokars and 46 other members. (2) Second, a supportive commitment to the management of Sanitary Landfill. The form of commitment made provides budget and human resources to carry out the management of this Sanitary Landfill. (3) Third, community support and participation for sanitary landfill management. The community does not want to liberate land because the land has the status of customary land or customary land. (4) Fourth, the budget and tools are limited for the management of Sanitary Landfills. In Sanitary Landfill, the Environment Agency requires a budget for infrastructure and a human resources budget.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v2i1.74>

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah dalam rangka mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan telah menjadi tangan besar bagi pemerintah dan masyarakat. Tempat pembuangan sampah sanitasi adalah salah satu cara paling populer untuk mencapai hal ini. Di mana limbah dibuang atau ditumpuk di area cekung, dipadatkan, lalu dikubur di bawah tanah. Limbah adalah produk sampingan padat dari aktivitas manusia sehari-hari dan/atau proses alami. Pengelolaan sampah dan sampah saat ini menjadi isu utama nasional.

Usaha pemerintah Indonesia dalam mengelola sampah telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa tujuan dari Pengelolaan Sampah yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Sanitary Landfill ialah salah satu metode pengolahan sampah yang digunakan di Indonesia. Selain itu juga, *Sanitary Landfill* menjadi strategi pengelolaan sampah yang melibatkan penimbunan sampah, penumpukannya, pemadatannya, kemudian menutupinya dengan tanah atau menutupnya.

Akan tetapi di Indonesia, dalam pelaksanaan sanitary landfill berdasarkan peraturan di atas masih mengalami permasalahan. Misalnya, peningkatan produksi sampah tidak didukung peningkatan fasilitas dan kualitas SDM dan rendahnya partisipasi masyarakat Daenie, M., & Rizqi, H. (2021). Sanitary landfill belum menggunakan teknologi pengolahan sampah (Winahyu, D., dkk, 2013). Adapun untuk beberapa daerah yang di Indonesia yang pelaksanaan sanitary landfill belum optimal yaitu di Kota Semarang dan Desa Bintang Rinjani.

Selain itu juga di Sumatera Barat pelaksanaan sanitary Landfill belum optimal, seperti di Kota Pariaman. Pada Kota Pariaman Terkhususnya di Desa Tungkal Selatan Kecamatan Pariaman Utara. Untuk itu, peran pemerintah desa dalam inisiatif meningkatkan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan mengubah sampah menjadi sumber daya. Hal ini terdapat dalam Peraturan Daerah No 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman pada pasal 31 ayat 1, 2 dan ayat 4. pada ayat (1) menjelaskan bahwa sistem pengolahan persampahan bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah, mendaur ulang, dan / atau

menggunakan kembali sampah dan mempromosikan keterlibatan masyarakat dalam sistem pengelolaan limbah, sistem pengelolaan limbah berupaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dan mengubah limbah menjadi sumber daya.

TPA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan di TPA Tungkal Selatan Kabupaten Pariaman Utara dengan menggunakan sistem sanitary landfill yang menganut konsep daur ulang sampah, pengurangan volume sampah, dan penggunaan kembali sampah. Peran pemerintah desa kota pariaman terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang pengelolaan sampah. Dalam pasal 7 ayat 2, kecamatan, dan desa di tingkat RT/RW bertanggung jawab untuk mengatur pengelolaan sampah dengan mempertemukan masyarakat setempat untuk mengolah sampah dengan sebaik-baiknya.

Selama ini, pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya untuk pengelolaan *Sanitary Landfill* seperti melaksanakan sosialisasi dengan Dinas Lingkungan Hidup mengenai pembebasan lahan. Sosialisasi sudah dilakukan ke masyarakat untuk pembebasan lahan agar di TPA di Desa Tungkal Selatan dapat tersusun dan bisa melaksanakan TPA *Sanitary Landfill*. Namun sampai saat ini masyarakat tidak mau melepaskan lahannya untuk kita ganti guri dikarenakan lahan masyarakat tersebut merupakan tanah ulayat. Selain itu juga masyarakat tidak ingin menjual lahan.

Selanjutnya melakukan pengawasan. Kurangnya pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan Pemerintah Desa dilakukan setiap hari. Pengawasan itu dilakukan agar dapat melihat adanya penumpukan sampah atau ada genangan air dari TPA tersebut. Jika pengawasan tidak dilakukan secara rutin maka dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Desa tidak mengetahui jika terjadinya penumpukan sampah yang banyak serta adanya genangan air di TPA. Karena dampak dari penumpukan sampah serta adanya genangan air dari sampah yang ada di TPA dapat mengalir keluar TPA sehingga aktivitas sehari – hari dari masyarakat sekitar TPA di Desa Tungkal Selatan terganggu.

Selanjutnya anggaran untuk pengelolaan *Sanitary Landfill* membutuhkan banyak biaya dalam pelaksanaannya. Anggaran itu telah diberikan oleh Pemerintah ke Dinas Lingkungan Hidup. Dalam *Sanitary Landfill* Dinas Lingkungan Hidup membutuhkan anggaran yang

sangat banyak tetapi dalam pelaksanaannya Dinas Lingkungan Hidup masih kekurangan anggaran seperti anggaran sarana prasarannya serta juga di tambah dengan anggaran sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan *Sanitary Landfill* dengan maksimal sangat membutuhkan anggaran yang banyak, sedangkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat itu sudah digunakan untuk gaji para anggota kebersihan. Dan karena kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman tidak dapat membeli peralatan yang baru untuk pengolahan sampah di TPA Desa Tungkal Selatan Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman.

Namun Peranan Pemerintah Desa Tungkal Selatan dalam melaksanakan *Sanitary Landfill* dalam bentuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan belum optimal. Hal ini dikarenakan terjadinya penumpukan sampah di TPA, Sehingga penumpukan sampah ini berdampak pada kesehatan masyarakat setempat.

Peranan pemerintah desa Tungkal Selatan dalam pelaksanaan *sanitary landfill* belum optimal, karena terbatasnya ketersediaan alat dalam pengolahan *sanitary landfill* dikarenakan alat pengeruk sampah atau excavator mengalami kerusakan sehingga dalam pengolahan sampah jadi tersendat-sendat.

Selain itu juga, peranan pemerintah desa tungkal selatan dalam pelaksanaan *sanitary landfill* belum optimal, dikarenakan kurangnya lahan yang disediakan pemerintah desa untuk melaksanakan pengolahan sampah, sehingga dalam pelaksanaan *sanitary landfill* belum terlaksana dengan baik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan semi kualitatif. Pendekatan purposive sampling digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi informan penelitian. Untuk metode pengumpulan data, digunakan observasi dan wawancara serta dokumentasi. Keabsahan data dievaluasi oleh peneliti dengan menggunakan metode triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan *sanitary landfill* oleh pemerintah desa dipengaruhi oleh beberapa faktor:

Pertama, Sumber daya manusia yang mendukung untuk pengelolaan *sanitary landfill*. pelaksanaan pengelolaan *sanitary landfill* ini membutuhkan banyak sumber daya manusia agar

pengelolaan ini dapat dikerjakan maksimal. Sumber daya manusia juga telah disediakan oleh pemerintah Kota Pariaman. Dengan adanya sumber daya manusia yang mendukung, akan memudahkan pemerintah dalam menjalankan program demi mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk sdm yang ada di Dinas Lingkungan Hidup pada anggota kebersihan memiliki 87 anggota kebersihan yang terdiri dari supir, stokarnya dan ditambah dengan 46 orang anggota lainnya. Selain itu juga dalam menjalankan pengolahan *Sanitary Landfill* itu dari pemerintah pusat juga mendukung untuk dilaksanakannya pengolahan sampah dengan metode *Sanitary Landfill* tersebut.

Kedua, Komitmen yang mendukung untuk pengelolaan *Sanitary Landfill*. Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Pusat sudah berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan *Sanitary Landfill* ini di TPA Desa Tungkal Selatan. Bentuk komitmen yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke Dinas Lingkungan Hidup itu memberikan anggaran dan sumber daya manusia untuk melaksanakan pengelolaan *Sanitary Landfill* ini. Oleh karena itu komitmen diperlukan untuk melaksanakan program tersebut. Karena, jika tidak adanya komitmen antar anggota maka kegiatan dari pengelolaan *sanitary landfill* ini tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Ketiga, kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat untuk pengelolaan *sanitary landfill*. Theresia et al. (2015;196) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam pengaturan kelompok yang mendorong mereka untuk berkontribusi dan berbagi tanggung jawab atas tujuan kelompok. Untuk pengelolaan *sanitary landfill* di TPA Desa Tungkal Selatan. Lahan yang ada di TPA hanya 3,5 hektar saja sedangkan untuk melaksanakan program membutuhkan 5 hektar lahan. Kurang 1,5 hektar lahan di TPA untuk melaksanakan program tersebut dengan maksimal. Kurangnya lahan dikarenakan masyarakat tidak mau membebaskan lahan mereka sebab lahan itu merupakan lahan yang berstatus tanah ulayat atau tanah adat. Dan lahan masyarakat itu juga untuk mata pencahariannya seperti berladang. Alasan lainnya pemerintah membeli lahan itu dengan harga yang murah dan masyarakat tidak menginginkan lokasi TPA berada di Desa Tungkal Selatan karena dalam pengolahannya tidak sesuai prosedur awal.

Keempat, anggaran dan alat terbatas untuk pengelolaan *Sanitary Landfill*. Anggaran menjadi motor penggerak seluruh komponen instansi

pemerintah. Salah satu faktor yang mempengaruhi pemerintah desa dalam pengelolaan *Sanitary Landfill* memerlukan anggaran yang cukup besar agar setiap pengelolaan sampah bisa dilaksanakan dengan efektif. Selain itu alat juga menjadi faktor penentu dalam pengelolaan sampah.

Dalam pengelolaan *Sanitary Landfill* ini sangat membutuhkan anggaran yang cukup banyak. Walaupun ada dana yang di berikan oleh pemerintah pusat ke Dinas Lingkungan Hidup itu terasa kurang karena dana tersebut digunakan untuk memperbaiki alat yang mengalami kerusakan dan untuk memberikan gaji anggota kebersihan.

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada pembahasan terdahulu maka ada beberapa hal yang menjadi suatu kesimpulan yaitu: (1) Sumber daya manusia. Untuk Sdm yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup pada anggota kebersihan memiliki 87 anggota kebersihan yang terdiri dari supir, stokarnya dan ditambah dengan 46 orang anggota lainnya. (2) Kedua, Komitmen yang mendukung untuk pengelolaan *Sanitary Landfill*. Bentuk komitmen yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke Dinas Lingkungan Hidup itu memberikan anggaran dan sumber daya manusia untuk melaksanakan pengelolaan *Sanitary Landfill* ini. (3) Ketiga, kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat untuk pengelolaan sanitary landfill. Penyebabnya karena masyarakat tidak mau membebaskan lahan mereka sebab lahan itu merupakan lahan yang berstatus tanah ulayat atau tanah adat. (4) Keempat, anggaran dan alat terbatas untuk pengelolaan *Sanitary Landfill*. Dalam *Sanitary Landfill* Dinas Lingkungan Hidup membutuhkan anggaran yang sangat banyak terutama anggaran sarana prasarannya dan anggaran sumber daya manusia.

Atas dasar kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi dapat dibuat yaitu Pegawai diharapkan untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana Pengelolaan *Sanitary Landfill* Di Desa Tungkal Selatan Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman.

DAFTAR PUSTAKA

Daenie, M., & Rizqi, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang. *Public Service and Governance Journal*, 2(01), 96-107.

Winahyu, D., Hartoyo, S., & Syaikat, Y. (2013). Strategi pengelolaan sampah pada tempat pembuangan akhir Bantargebang, Bekasi. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 5(2).

Abdul Wachid. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 6, No. 2, 2020 p-ISSN: 2442-8884 / e-ISSN: 2541-4542 DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2>

Eli Herlina. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Dusun Batman. *Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan* (E-ISSN 2599-3259) Volume xx, Nomor xx, Juni 2019 (xx) DOI: xxx408

Grindle, Marilee. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.

Kristian Agung. (2021). Analisis Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Sido Makmur Kecamatan Sipora Utara. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi* Vol. 6, No. 2, September 2021 Halaman: 115-124 Online: <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JPI> G/

Peraturan Daerah No 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman

Pricilia B. Diamanis. (2022). Perencanaan TPA *Sanitary Landfill* Di Kecamatan Esang Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara. *Jurnal TEKNO* Volume 20 Nomor 82 Desember 2022

Salma Afifah. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Menjadi Gas Metan di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. *Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia*, Juli 2021, p 107-112 p-ISSN 2356-2226 e-ISSN 2655-8114 Volume 8, Nomor 2 <http://dx.doi.org/10.31258/dli.8.2.p.107-112> <https://dli.ejournal.unri.ac.id/index.php/DL>

T. Syarif Hidayatullah. (2018). Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir Desa Mulyang Kute Mangku Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Ilmiah*

Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol. 2(4) November 2018, pp.798-806 ISSN: 2597-6885 (online)

2, April 2020 DOI:
<http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v4i2.106>

Tamrin Muchsin. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* Vol 5, No 2 (2020)

Undang-Undang Nomor Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Van Meter dan Van Horn. (1975). Model-model dalam Kebijakan Implementasi. Yogyakarta: Cv Rineka

Umi Mustaghfiroh. (2020). Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X Volume 4, Nomor

Yorenza, Y., & Yusran, R. (2020). Policy Implementation of the Use of Plastic Bags by Community and Business Players in Achieving Sdgs in Padang City. *Science and Environmental Journal for Postgraduate*, 3(1), 14-2